

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Ardhian Eko, 2017. *Kompilasi Hukum Korupsi*. Istana Media. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Garfika. Jakarta
- Elwi Daniel, 2014. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Efi Laila Kholis, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Solusi Publishing, Jakarta.
- Febby Mutiara, 2020. *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. PT. Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta.
- IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Total Media. Yogyakarta.
- Kumanto Sunarto, 2000. *Pengantar Sosiologi*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Nur Prayitno, 2015. *Penyakit Sosial Itu Adalah Korupsi*. Istana Media. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Soerjono dan Abdurrahman, 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- R. Wiyono, 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit UI- Press. Jakarta.
- Theodorus M. Tuanakotta. 2014. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ruslan Saleh. 2009. *KUHP dengan penjelasan*. Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum Yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim Atau Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Jurnal

Abvianto Syaifulloh, 2019. *Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi*. Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL). Vol. 1.No. 1.

Ade Mahmud, 2018. *Problematics Of Asset Recovery In Restoring State Loss Duet O Corruption (An Analysis Of Court Decision Number 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr*. Jurnal Yudisial Vol.11 No.3.

- , 2019. *Strategi Pengekan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Uang Pengganti*. Nagari Law Review. Vol.3 No.1.
- Christine Juliana Sinaga, 2017. *Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Wawasan Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Vol. 1 No. 2.
- Darmadi Djufri, Et. Al. 2020. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol. 26 No.2.
- Fransisco Mekel, 2020. *Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan Kuhap*. Lex Administratum. Vol. 8 No. 4.
- Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyant & Laely Wulandari, 2014. *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011)*, E-Journal Lentera Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ). Vol.1. No. 1.
- Guntur Rambey, 2016. *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*. De Lega Lata Vol. 1. No. 1.
- Indra Yudha Koswara, 2019. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jur, Vol. 4. No.1.
- Nani Mulyati Dan Aria Zurnetti, 2022. *Asset Recovery As A Fundamental Principal In Law Enforcement Of Corruption By Corporations*, Andalas Internasional Journal Of Socio-Humanities (AIJOSH). Vol.4 No.1.
- Naomi Sari Kristiani, 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mdn*. Sign Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 1.
- Nur Iftitah Isnantiana, 2017. *Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan*, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 18 No. 2.
- Rahma Novianty, 2019. *Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Nagari Law Review. Vol.2 No.2.
- Saut Malutua dan Ferdricka Nggeboe, 2017. *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legalitas. Vol.9 No.1.
- Sutarto, 2021. *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Vol.2 No.1.
- Tegar Harbiyana Putra, Adhiputro Pangarso. 2022. *Implementasi Putusan Pidanaan Dan Penuntutan Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ekonomi Sosial & Humaniora. Vol 3 No. 12.

Ucuk Agiyanto, 2018. *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*. Hukum Ransidental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Surakarta: Genta Publishing Ponogoro.

Yayan Indriana, 2018. *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Cepalo, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol. 2 No. 2.

Zaini, 2019. *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal*. Voice Justice, Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 3 No. 2.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pdg. Putusan Nomor: 111/ TIPIKOR/ 2021/ PT.Pdg. Putusan Nomor: 2203 K/Pid.Sus/2022.

E. Website

Diky Anandya, *Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021*. <https://antikorupsi.org/id>. Diunggah pada tanggal 30 Agustus 2021, diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 23.40 WIB.

